

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASA PENDUDUKAN JEPANG
TAHUN 1942-1945 DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO**

2026

MOTTO

“Tidak semua langkah mudah. Tapi setiap langkah mendekatkan pada tujuan.”



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jepang mulai mendarat dan memasuki wilayah Indonesia pada Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Proses masuknya tidak berlangsung mudah karena mendapat perlawanan dari KNIL sebagai tentara Hindia Belanda. Upaya penahanan tersebut tidak berhasil akibat kekuatan militer Jepang yang lebih unggul dan sulit dikalahkan (Yasmis, 2007). Keberhasilan Jepang kemudian ditunjukkan melalui penguasaan wilayah Indonesia secara bertahap. Penyerahan tanpa syarat oleh Belanda terjadi pada 8 Maret 1942, menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada awalnya menyambut perubahan kekuasaan tersebut dengan sikap positif. Harapan akan terbebas dari penjajahan serta tercapainya kemerdekaan menjadi alasan utama munculnya penerimaan tersebut. Jepang terus memanfaatkan propaganda untuk memperoleh simpati sekaligus menjaga stabilitas kekuasaannya. Peralihan kekuasaan ini membawa berbagai perubahan penting dalam sistem kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Penghapusan sistem kasta memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat dari golongan menengah ke bawah untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan serta peraturan baru juga mulai diberlakukan oleh Jepang. Sistem pendidikan disusun dalam empat jenjang, yaitu Taman Kanak-Kanak (Yōchien), Sekolah Dasar (Shōgakkō), Sekolah Menengah Pertama (Chūgakkō), dan Sekolah Menengah Atas (Kōtōgakkō), disertai penyediaan lembaga pendidikan bagi tenaga pengajar di beberapa kota di Indonesia. Pendudukan Jepang tidak semata-mata bertujuan membebaskan Indonesia dari kolonialisme Belanda maupun memperbaiki sistem pendidikan. Pendidikan dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarkan propaganda serta menanamkan ideologi Jepang kepada masyarakat. Pendidikan di arahkan agar menghasilkan tenaga kerja yang dapat membantu kebutuhan perang Jepang yang hanya akan mempersulit Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Akibatnya, pendudukan Jepang di Indonesia mirip dengan pendudukan Belanda bahkan membuat rakyat

semakin menderita. Sebelum abad ke-20, pendidikan Belanda pada masa kolonial mengacu pada sistem pendidikan yang diperkenalkan dan dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah jajahannya, termasuk di Indonesia. Sistem ini memiliki beberapa ciri khas yakni Kolonialisme Edukatif, Kelas Sosial dan Etnis, Pengaruh Agama, dan Pendidikan Elit. Pendidikan Belanda di masa kolonial menjadi alat penting bagi Belanda untuk mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah jajahannya dengan menanamkan budaya dan nilai-nilai kolonial kepada penduduk setempat. Meskipun pendidikan Belanda di koloni-koloni mereka memberikan akses terbatas kepada penduduk pribumi, sistem ini juga menjadi alat penting dalam menyebarkan ideologi kolonialisme dan menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak Indonesia pada masa kolonial Belanda dibedakan menjadi dua jenis sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Kelas I (*De Eerste Klasse School*) yang diperuntukkan bagi anak-anak tokoh atau kalangan elit, serta Sekolah Dasar Kelas II (*De Tweede Klasse School*) bagi masyarakat umum (Soemanto dan Soeyarno, 1982:40). Pembagian tersebut didasarkan pada kepentingan dan tujuan pemerintah kolonial dalam mempertahankan kekuasaan melalui struktur sosial berbasis aristokrasi.

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang berlandaskan prinsip *Hakko Ichiu*, yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Orientasi utama pendidikan diarahkan pada pembentukan tenaga kerja terampil dan pasukan yang mampu mendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Penyelenggaraan pendidikan mengalami perubahan mendasar, termasuk penyesuaian kebijakan dan sistem (Mudyahardjo, 2006:269–270). Sekolah yang dibuka kembali dimanfaatkan sebagai media propaganda anti-Barat. Kalangan muda dari berbagai latar belakang dihimpun untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan status sosial masyarakat, sekaligus mengubah pola pikir dari orientasi Eropa menuju ideologi Jepang melalui materi pembelajaran yang diterapkan.

Kebijakan pendidikan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda serta bahasa Eropa lainnya dalam proses pembelajaran. Sejumlah lembaga pendidikan

ditutup atau tidak diizinkan beroperasi. Pembatasan juga diberlakukan terhadap pendirian sekolah lanjutan oleh pihak swasta, sehingga lembaga yang ingin beroperasi kembali harus memperoleh izin ulang sebagai bentuk kontrol. Kebijakan tersebut berdampak pada kemunduran signifikan dalam aspek kelembagaan maupun operasional pendidikan (Sadana Arta, 2015:91).

Upaya memperoleh dukungan masyarakat dilakukan melalui pendekatan kepada tokoh pribumi. Pembentukan organisasi Putra Tenaga Rakyat (PTR) pada tahun 1943 melibatkan tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Peran Ki Hajar Dewantara sebagai penasehat pendidikan menunjukkan adanya strategi Jepang untuk menarik partisipasi tenaga lokal. Pengalaman kegagalan penerapan Japanisasi di Manchuria dan China mendorong penyesuaian kebijakan pendidikan di Indonesia agar lebih sesuai dengan kondisi lokal (Sadana Arta, 2015:90).

Perubahan sistem pendidikan yang diterapkan Jepang memberikan pengaruh pada masyarakat, khususnya generasi muda di Yogyakarta. Penghapusan penggunaan bahasa Belanda dalam kurikulum mengurangi kesenjangan psikologis antara siswa dari desa dan kota. Kurikulum yang seragam serta penggunaan lagu-lagu Jepang dan Indonesia turut membentuk rasa kesetaraan sosial di kalangan pelajar dari berbagai latar belakang. Kondisi pendidikan pada awal masa pendudukan Jepang dinilai lebih terbuka dibandingkan masa Belanda, meskipun tetap berada dalam kerangka kepentingan politik Jepang.

Reorganisasi sistem pendidikan dilakukan dengan menghapus dualisme antara sekolah Barat dan pribumi. Struktur pendidikan meliputi sekolah dasar *Shoto Kokumin Gakko* selama tiga tahun yang setara dengan Sekolah Volks pada masa Belanda, serta *Kokumin Gakko* sebagai pendidikan lanjutan selama tiga tahun. Pembukaan kembali sekolah dilakukan secara bertahap sehingga memungkinkan kelanjutan pendidikan bagi siswa.

Kebijakan Jepang di Yogyakarta berfokus pada penataan ulang ekonomi bekas peninggalan Hindia Belanda guna mendukung kebutuhan perang dan kepentingan ekonomi kawasan Asia Timur dan Tenggara. Program militer diarahkan untuk menghilangkan pengaruh Barat serta memobilisasi masyarakat

dalam mendukung kemenangan Jepang. Sistem pendidikan yang diterapkan berbeda dari sebelumnya, dengan jenjang pendidikan meliputi sekolah umum enam tahun, sekolah menengah pertama tiga tahun, dan sekolah menengah atas tiga tahun. Pendidikan guru diselenggarakan melalui beberapa jenjang, yaitu *Shoto Shihan Gakko* (dua tahun), *Cuto Shihan Gakko* (empat tahun), dan *Koto Shihan Gakko* (enam tahun). Fokus pendidikan diarahkan pada pembentukan disiplin mental dan pelatihan militer, sekaligus membawa unsur demokratisasi yang memiliki tujuan politis.

Ketertarikan terhadap kajian ini muncul karena masa pendudukan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun memberikan pengaruh yang cukup besar di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka pokok-pokok perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Masa Pendudukan Jepang Pada Tahun 1942-1945 di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Pendidikan Jepang terhadap Perkembangan Pendidikan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang Pada Tahun 1942-1945 di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui Dampak Pelaksanaan Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang terhadap Perkembangan Pendidikan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari kajian Pelaksanaan Pendidikan Masa Pendudukan Jepang Pada Tahun 1942-1945 di Kota Yogyakarta, diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Memberikan ilmu tambahan dan pengembangan wawasan dalam perkuliahan terutama pada pembelajaran sejarah pendidikan. Sehingga mahasiswa maupun pembaca dapat mengetahui sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda.
- b. Merangsang minat pembaca untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan pendidikan pada masa pendudukan Jepang
- c. Dengan penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui dampak pelaksanaan pendidikan pada masa pendudukan Jepang terhadap perkembangan pendidikan di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat praktis bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah dan pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang.

b. Bagi Dunia Pendidikan

Manfaat praktis bagi ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, dapat dijadikan sebagai kajian lanjut untuk mengembangkan pengetahuan tentang sejarah pendidikan Indonesia

c. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi Masyarakat adalah penulisan skripsi digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang berguna untuk menambah wawasan masyarakat tentang kebijakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pelaksanaan Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan mencakup tiga aktivitas utama, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Fokus pendidikan tertuju pada manusia yang memiliki beragam aspek serta karakteristik yang kompleks, sehingga tidak terdapat batasan yang sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh proses pelaksanaannya.

Pelaksanaan pendidikan dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum untuk memenuhi hak belajar peserta didik, termasuk bagi anak yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan dalam program pendidikan tertentu. Komponen utama dalam pelaksanaan pendidikan meliputi guru, peserta didik, sarana dan prasarana, proses kegiatan belajar mengajar, serta pembiayaan.

Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Pendudukan Jepang

Jepang mulai mewujudkan tujuannya untuk membangun Persemakmuran Asia Timur Raya pada tanggal 8 Desember 1941, ketika menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan ini memberikan dorongan awal untuk kapitulasi Jepang di kawasan Asia Pasifik.

Pertemuan antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh, Panglima KNIL Jenderal Ter Poorten, dan Panglima Jepang Jenderal

Imamura berlangsung pada 8–9 Maret 1942 di Kalijati, Subang, untuk menandatangani kapitulasi Belanda kepada Jepang. Peristiwa tersebut menandai beralihnya kekuasaan kolonial dari Belanda kepada Jepang. Kehadiran Jepang awalnya mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia akibat propaganda yang menarik perhatian. Jepang memperkenalkan diri sebagai “saudara tua” yang berkeinginan membentuk kawasan persemakmuran di Asia Pasifik. Gagasan tersebut diwujudkan melalui Gerakan 3A yang meliputi Jepang sebagai Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia.

Pemerintah Jepang kemudian membentuk organisasi militer yang melibatkan masyarakat Indonesia. Pembentukan PETA dilakukan pada 3 Oktober 1943 berdasarkan Osamu Seirei Nomor 44 Tahun 1943 dengan tujuan menghadapi Sekutu dalam Perang Dunia II. Pembentukan organisasi lain dilakukan pada 1 Maret 1944 melalui Jawa Hokokai yang dipimpin oleh Gunseikan dengan Soekarno sebagai penasihat utama. Organisasi ini bertujuan menghimpun kekuatan fisik dan mental masyarakat Indonesia dengan semangat pengabdian. Keanggotaan Jawa Hokokai mencakup berbagai kelompok profesi, seperti tenaga medis, pendidik, organisasi perempuan, serta bidang kebudayaan.

Kebutuhan Jepang terhadap tenaga kerja meningkat seiring luasnya wilayah pendudukan yang harus dipertahankan. Tenaga kerja diambil dari desa-desa, terutama di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, melalui sistem kerja paksa yang dikenal sebagai romusha. Pelaksanaan romusha berlangsung pada periode 1942 hingga 1945 dengan penempatan tenaga kerja tidak hanya di wilayah Indonesia, tetapi juga di berbagai kawasan Asia Tenggara, seperti Birma, Muangthai, Vietnam, Malaysia, dan Serawak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Jepang memanfaatkan orang-orang Indonesia untuk keperluannya sendiri agar Jepang di menguasai Asia Timur Raya.

3. Sejarah Pendidikan Jepang

Sistem pendidikan Jepang memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di negara-negara Barat yang dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama pada akhir abad ke-19 Jepang sepenuhnya menciptakan kembali sistem pendidikannya

berdasarkan sistem pendidikan negara-negara barat sebagai bagian reformasi radikal yang dibawa oleh Restorasi Meiji. Kedua, Amerika Serikat memaksakan sistem pendidikannya sendiri kepada Jepang selama pendudukan pasca perang.

Sebelum masa Meiji, pendidikan merupakan hak prerogative orang kaya dan tidak diatur oleh pemerintah. Pemerintah Meiji segera melembagakan sistem pendidikan baru. Tahun 1872, pemerintah menetapkan 4 tahun pendidikan wajib bagi semua anak laki-laki dan perempuan di seluruh negeri. Akan tetapi, tingkat kehadiran sekolah tidak melebihi 25 % hingga 5% pada decade pertama sistem baru tersebut. Kemudian ditahun 1905, tingkat kehadiran sekolah untuk anak usia sekolah telah mencapai 98% untuk anak laki-laki dan 93% untuk anak perempuan, dan sekitar 1 % dari populasi yang memenuhi syarat melanjutkan ke sekolah menengah pertama.

Pada era kuno dan feodal, pembelajaran berbasis budaya Tiongkok, ajaran Buddha, Konfusianisme diperkenalkan di istana Yamato. Focus pendidikan pada kaligrafi, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemudian pada masa restorasi meiji, pendidikan menjadi pusat pada negara, wajib militer, dan bertujuan modernisasi. Pada tahun 1872, pendidikan dasar 4 tahun diberlakukan kemudian diperpanjang menjadi 6 tahun pada 1907. Kurikulum menekankan moralitas, loyalitas dan nilai-nilai konservatif. Pendidikan masa perang sistem pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan militeristik dan propaganda dimana sekolah diawasi ketat oleh pemerintah.

4. Sejarah Pendidikan

Sejarah pendidikan merupakan kumpulan pengalaman yang menggambarkan perkembangan dasar, fungsi, tujuan, jenis, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, kurikulum, serta sumber daya pemikiran dari masa ke masa.

Pendidikan pada masa kolonial di Indonesia berperan sebagai sarana bagi penjajah untuk mengendalikan sekaligus memperkuat kekuasaannya. Uraian berikut menyajikan gambaran singkat mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia sejak masa kolonial Belanda hingga masa pendudukan Jepang.

Pendidikan pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 mulai berkembang sebagai bagian dari kepentingan pemerintahan kolonial. Tujuan utama penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mencetak pegawai kolonial serta tenaga kerja terampil yang mampu mendukung kebutuhan administrasi dan perekonomian Belanda. Sistem pendidikan Belanda ini lebih banyak mengutamakan pendidikan untuk kaum priyayi (bangsawan Jawa) dan kaum pribumi yang terpilih, sementara mayoritas rakyat Indonesia tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

Awal abad ke-20 ditandai dengan berkembangnya gerakan nasionalisme di Indonesia yang berfokus pada perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara berperan dalam mendirikan lembaga pendidikan modern yang menanamkan nilai kebangsaan, salah satunya melalui Taman Siswa. Pendidikan tersebut diarahkan untuk memberdayakan masyarakat serta menumbuhkan kesadaran nasional. Perubahan besar terjadi pada tahun 1942 ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia dan menggantikan pemerintahan kolonial Belanda. Jepang kemudian membentuk sistem pendidikan baru yang disesuaikan dengan ideologi dan kepentingan kekuasaannya. Mereka memperkenalkan kurikulum yang lebih bersifat militeristik dan memasukkan unsur-unsur propaganda Jepang. Meskipun pendidikan Jepang juga memperkenalkan program pendidikan untuk rakyat Indonesia, tujuannya tetap untuk mendukung kepentingan imperial Jepang.

Pada dasarnya, baik pendidikan Belanda maupun pendidikan Jepang di Indonesia selama masa kolonial memiliki tujuan politik yang kuat, yakni untuk memperkuat dominasi kolonial mereka. Meskipun pendidikan nasionalisme Indonesia tumbuh di bawah pendidikan Belanda, pendidikan Jepang juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan Indonesia dan gerakan kemerdekaan.

B. Penelitian yang Relevan

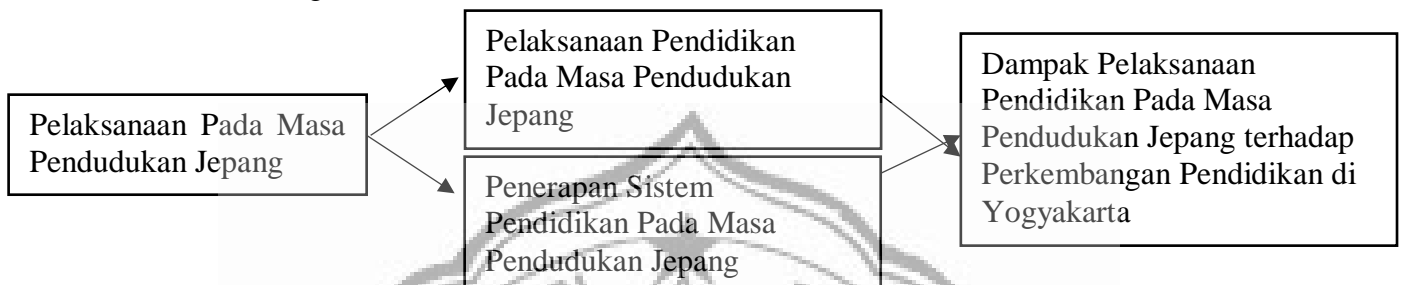
Sebelum penelitian ini dilakukan, telah terdapat beberapa studi yang mengkaji topik serupa. Penelitian-penelitian ini menjadi sebuah referensi bagi

penulis untuk menentukan fokus dan kajian penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan dengan penelitian yang dikaji, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pertama adalah Skripsi Hidayat tahun 1997 yang berjudul, *“Dampak Mobilasi Pelajar Indonesia oleh Jepang Terhadap Perkembangan Nasionalisme Indonesia Tahun 1901-1930”* membahas bahwa pendidikan di masa pendudukan Jepang untuk sarana umum dan sarana khusus untuk memobilisasi pelajar dengan mengadakan latihan dasar kemiliteran untuk barisan pelajar. Hal tersebut dilakukan melalui pendidikan umum dengan cara menjadikan tingkatan sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk sarana dalam menyampaikan propaganda Jepang dan digunakan sebagai tempat mendidik para pelajar. Sedangkan pendidikan khusus ditempuh dengan berbagai program pelatihan militer yang dibentuk oleh Jepang seperti *Gakukotai, Seinendan, Keibodan, Heiho, dan PETA*.
2. Penelitian kedua adalah Skripsi Sholeh tahun 2021 yang berjudul *“Pendidikan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)”*. Membahas tentang analisis dan mendeskripsikan landasan filsafat pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, menganalisis dan mendeskripsikan sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, serta menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942-1945.
3. Penelitian ketiga adalah Skripsi Sasmita tahun 1991 yang berjudul *“Pelajar Pejuang Bersenjata pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945”* membahas tentang pelajar pejuang bersenjata serta membahas tentang pendidikan masa pendudukan Jepang. Sekolah-sekolah dibuka kembali dan dihapusnya diskriminasi pada bidang pendidikan, agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh kesempatan dalam mengenyam dunia pendidikan.

C. Kerangka Berpikir

Secara singkat kerangka berpikir bagi penelitian ini bisa digunakan dengan skema sebagai berikut:



Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang membawa perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut tampak pada banyaknya sistem yang diubah maupun dihapus, termasuk penghapusan sistem golongan yang membuka kesempatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses pendidikan. Jepang juga menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan baru dalam bidang pendidikan. Empat jenjang pendidikan bagi siswa serta beberapa jenis sekolah untuk guru didirikan di berbagai kota sebagai bentuk penyesuaian sistem pendidikan.

Kebijakan pendidikan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan pengajaran terkait Belanda maupun bahasa Eropa lainnya. Sejumlah sekolah ditutup atau tidak diizinkan beroperasi. Pendirian sekolah lanjutan oleh pihak swasta juga dibatasi. Penyeragaman sekolah dasar dilakukan untuk mempermudah pengawasan, disertai penutupan sekolah yang menggunakan bahasa Belanda.

Dampak kebijakan tersebut sangat terasa karena sebelumnya bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar utama di sekolah. Jepang kemudian menghadirkan juru bahasa untuk membantu proses pembelajaran. Penggunaan bahasa Jepang diperkenalkan sebagai pengganti melalui pembukaan sekolah bahasa, penyelenggaraan perlombaan, serta penerapan bahasa Jepang dalam ujian calon

guru dan ujian akhir siswa. Berbagai unsur pendidikan yang diterapkan turut memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat pribumi.

